

## Komparasi Kebijakan Pemerintah Masa Kepemimpinan Jokowi Periode Pertama Dan Kedua Dilihat Dari Teori Utilitarian

Tsurayya Shafa Kamila  
Universitas Gadjah Mada

Korespondensi Penulis: [tsurayyashafakamila@mail.ugm.ac.id](mailto:tsurayyashafakamila@mail.ugm.ac.id)

**Abstract.** Justice is one of the benchmarks for knowing the character and way of leading a person, one of which is the head of government in terms of leading the country. This research will discuss the justice provided during President Joko Widodo's two terms of office. Then it is implemented into a policy and then the policies are compared, which period fulfills the characteristics of justice and benefits better. Researchers provide limitations regarding the concepts of justice and benefit in legal policy. This research uses a normative method, namely by reading literature in the form of laws and regulations and government policies that have been made during his term of office in the 2019-2024 period. The aim of this research is to determine the fulfillment of the sense of justice and elements of benefit in the policies that were created during the two periods of President Joko Widodo's leadership.

**Keywords:** Justice, Policy, Leadership and Utilitarian

**Abstrak.** Keadilan merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui karakter dan cara memimpin seseorang, salah satunya kepala pemerintahan dalam hal memimpin negara. Penelitian ini akan membahas tentang keadilan yang diberikan di masa jabatan presiden Joko Widodo dalam dua periode. Kemudian diimplementasikan menjadi suatu kebijakan dan kemudian kebijakan tersebut dikomparasikan, periode mana yang lebih memenuhi sifat keadilan dan kemanfaatan. Peneliti memberikan batasan mengenai konsep keadilan dan kemanfaatan pada kebijakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu dengan membaca literatur berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan yang sudah dibuat selama masa jabatannya di periode 2019-2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan rasa keadilan dan unsur kemanfaatan pada kebijakan yang telah di buat di masa kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam dua periode.

**Kata kunci :** Keadilan, Kebijakan, Kepemimpinan dan Utilitarian

### PENDAHULUAN

Pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem presidensial ini presiden memiliki kedudukan yang sama dengan legislatif.<sup>1</sup> Dalam hal pembuatan suatu kebijakan dimana salah satu kewenangan yang dimiliki Presiden yaitu merancang dan mengesahkan rancangan undang-undang yang bersama badan legislatif.<sup>2</sup> Pada dasarnya fungsi legislasi merupakan tugas utama dari lembaga legislatif, namun setelah adanya amandemen UUD 1945, lembaga eksekutif dapat dimungkinkan untuk ikut dalam hal membentuk undang-undang bersama lembaga legislatif.<sup>3</sup> Adapun produk hukum yang dibuat Presiden diantaranya adalah Undang-Undang (UU) yang

<sup>1</sup>Ribkha Annisa Octovina. 2018. "Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.4, No.2,Hlm. 248.

<sup>2</sup> Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>3</sup>Farida Azzahra. 2021. "Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 18, No. 2. Hlm. 155.

dikerjakan bersama lembaga legislatif kemudian diratifikasi oleh presiden. Peraturan Pemerintah (Perpu) yang dikeluarkan ketika terjadi keadaan atau situasi mendesak. Peraturan Presiden (Perpres).<sup>4</sup> Dalam kurun waktu 2019-2024 Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan berjumlah 4 Peraturan Pemerintah (Perpu).<sup>5</sup> Salah satunya adalah Perpu No.1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang diterbitkan pada 31 Maret 2020.<sup>6</sup> Perpu ini dibuat karena adanya keadaan darurat kesehatan di Indonesia yang disebabkan adanya virus Covid-19.

Setelah mengetahui salah satu kewenangan presiden adalah membuat peraturan maka secara tidak langsung hal tersebut dapat mencerminkan sifat atau menggambarkan bagaimana caranya ia memimpin suatu negara. Contohnya pada masa kepemimpinan Soekarno yang mengeluarkan kebijakan dengan menggunakan prinsip *trisakti* yaitu : 1). Tidak memihak pada berdaulat dalam politik, 2). Berdikari dalam ekonomi dan 3). Berkepribadian dalam budaya.<sup>7</sup> Kemudian masa kepemimpinan soeharto yang identik dengan kebijakan yang otoriter. Hal tersebut dapat dilihat pada produk hukumnya, salah satunya adalah MPR dapat merumuskan GBHN.<sup>8</sup> Kemudian pada kepemimpinan Joko Widodo yang identik dengan mengeluarkan banyak sekali kebijakan (*hyper regulated*).<sup>9</sup> Melihat pada beberapa contoh yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa suatu kebijakan dapat menggambarkan sifat kepemimpinan suatu pemimpin negara. Hal tersebut juga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap masa kepemimpinan era Joko Widodo di dalam dua periode. Meskipun ia menjabat selama dua periode namun kebijakan yang dikeluarkannya memiliki tujuan dan sifat yang berbeda. Dari sini peneliti menemukan rumusan masalah berupa mengapa sebuah kebijakan yang dikeluarkan itu berbeda walaupun yang memimpin itu sama dan kebijakan diperiode mana yang telah memenuhi asas keadilan bagi masyarakat.

---

<sup>4</sup> Henny Juliani. 2020. "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020". *Administrative Law Dan Governance Journal*. Vol. 3, No. 2. Hlm. 332.

<sup>5</sup> Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. <https://Peraturan.Go.Id>. Diakses Pada 11 November 2023.

<sup>6</sup> *Ibid*.

<sup>7</sup> Mochdar Suleman Dan Mohammad Noer. 2017.. "Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015" *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*. Vol.13, No. 1, Hlm. 1964.

<sup>8</sup> Aysel Awanisa. 2022. "Analisis Hubungan Sistem Politik Dan Karakter Produk Hukum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 4, No. 1, Hlm 44.

<sup>9</sup> Rizal Irvan Amin, Riska Ulfasari Dan Tegar Satrio W. 2020. "Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 15, No. 2, Hlm. 191.

## KAJIAN TEORITIS

Pada suatu kebijakan tentu harus memenuhi beberapa unsur yaitu struktur, substansi dan budaya hukum untuk mengetahui seberapa efektif suatu kebijakan tersebut berlaku di lingkungan masyarakat.<sup>10</sup> Selain itu kebijakan tidak hanya memperhatikan keefektifitasan saja namun bagaimana kebijakan itu dapat bersifat adil dan memberikan manfaat bagi yang melaksanakannya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Stuart Mill yang menyatakan bahwa keadilan itu harus menghubungkan antara keadilan dan kegunaan dan kepentingan umum.<sup>11</sup> Dalam hal mewujudkan keadilan yang keberpihakan maka diperlukannya suatu aturan yang didalamnya menetapkan suatu pemberian kebebasan yang sama bagi tiap individu.<sup>12</sup> Disisi lain pembuatan kebijakan juga dapat memberikan gambaran bagaimana cara pemimpin itu memimpin suatu negara. Menurut Nonet-Selznick suatu kebijakan dapat dikatakan responsive apabila bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>13</sup> Maka peneliti beranggapan bahwa pemimpin yang adil haruslah mengeluarkan kebijakan yang adil dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu untuk membuktikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh beberapa pemimpin dapat menggambarkan cara kepemimpinannya.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan mengkaji norma hukum dalam hukum positif dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan realitas yang terjadi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Guna mempertajam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundangan-undangan dan beberapa kebijakan pemerintahan yang pernah dikeluarkan pada periode kepemimpinan Joko Widodo selama dua periode. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjabarkan bagaimana kebijakan yang telah dibuat oleh presiden ketika menjabat selama dua periode dalam pemenuhan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dan mengetahui periode mana yang lebih memenuhi kesejahteraan Masyarakat.

---

<sup>10</sup> Estomihi Fp Simatupang, Sh. 2020. " Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman". Media Belajar Hukum. Diakses, Diakses Pada 22 November 2023. *Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman - Beranda Hukum*

<sup>11</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak Dan Markus Y Hage. 2013. Teori Hukum Startegi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi. Yogyakarta: Genta. Hlm 86.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Op.,Cit.* Hlm 186.

<sup>14</sup> Rachmat Harun. 2015. "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Lex Crimen.* Vol. Iv, No. 4, Hlm. 49.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Pemerintahan Yang Telah Dikeluarkan**

Menurut Harold D. Laswell kebijakan merupakan suatu pencapaian atau tujuan yang akan dicapai, nilai dan implementasinya memiliki arah.<sup>15</sup> Sedangkan menurut James E. Anderson kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian Tindakan yang memiliki tujuan dan diikuti dengan praktik dan menyelesaikan suatu permasalahan.<sup>16</sup> Dalam hal mengeluarkan kebijakan merupakan salah satu kewenangan Lembaga eksekutif. Presiden merupakan Lembaga eksekutif. Kebijakan yang dapat dikeluarkan presiden diantaranya adalah Undang-undang yang dibentuk Bersama Lembaga legislative, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden dan surat edaran sebagai peraturanpelaksanaannya.<sup>17</sup>

Berikut adalah beberapa kebijakan yang dikeluarkan pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo dari periode pertama hingga periode kedua.

#### **a. Kebijakan Pemerintahan Di Periode Pertama**

Pada masa kepemimpinan Joko Widodo di peridode pertama. Pemerintah memfokuskan pada peningkatan dibidang infrastruktur.<sup>18</sup> Pada masa ini pemerintahan ingin mewujudkan pemerataan di Indonesia, tidak hanya terpusat dipulau jawa.<sup>19</sup> Hal tersebut dapat dilihat pada kebijakan presiden mengenai Pembangunan jalan tol Cikopo-Palimanan, Pembangunan MRT di ibukota, LRT di Palembang dan ibu kota, Pembangunan bandar udara, Pelabuhan, bendungan irigasi.<sup>20</sup> Keunggulan yang diraih atas terlaksananya kebijakan ini salah satunya meningkatkan perekonomian di daerah Indonesia, harga komoditas dapat dikendalikan, dan lancarnya distribusi logistik karena infrastruktur yang sudah diperbaiki.<sup>21</sup>

Namun ternyata disisi lain terdapat kekurangan dengan adanya kebijakan tersebut. Pemerintah terlalu berfokus pada infrastruktur yang harus dikembangkan sehingga menyebabkan keterpurukan dan kurangnya perhatian terhadap hukum dan HAM. Hal tersebut tampak jelas pada periode pertama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo terjadi

---

<sup>15</sup> Sri Suwitri. .Buku Ajar Menegnai Analisis Kebijakan Publik. Diakses Pada 21 November 2023. [Pdfkebijakan Publik-Libre.Pdf \(D1wqtxs1xzle7.Cloudfront.Net\)](#)

<sup>16</sup> Gede Marhaendra Wija Atmaja, Dkk. 2022. *Hukum Kebijakan Publik*. Denpasar : Swasta Nulus. Hlm. 13.

<sup>17</sup> Hukumonline. Willa Wahyuni. 2022. Ada Keputusan Presiden Dan Instruksi Presiden, Apa Bedanya?. Diakses Pada 23 November 2023. [Ada Keputusan Presiden Dan Instruksi Presiden, Apa Bedanya? \(Hukumonline.Com\)](#)

<sup>18</sup> Sekertariat Presiden Ri. Diakses Pada 22 Novvember 2023. [Presiden Joko Widodo • Presiden Ri](#)

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> Kompas. Fabian Januarius Kuwodo. 2018 . “4 Tahun Jokowi-Jk Dan Catatan Pembangunan Infrastruktur”. Diakses Pada 22 November 2023 . [4 Tahun Jokowi-Jk Dan Catatan Pembangunan Infrastruktur \(Kompas.Com\)](#)

<sup>21</sup> Detik News. Angga Laraspati. 2022. “Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Dinilai Buat Ekonomi Ri Kuat”. Diakses 22 November 2023. [Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Dinilai Buat Ekonomi Ri Kuat \(Detik.Com\)](#)

pelemahan peraturan pada KPK dan UU ITE yang sering disalah artikan sehingga banyak sekali permasalahan yang dikenai pasal UU ITE.<sup>22</sup>

### **b. Kebijakan Pemerintahan Di Periode 2**

Pada masa ini presiden Joko Widodo dan kabinetnya memfokuskan pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Tujuannya agar bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Namun program pembangunan infrastruktur seperti pemindahan ibu kota masih tetap dilanjutkan bersamaan dengan itu walaupun mengalami sedikit penundaan.<sup>23</sup>

Pada periode ini rencana dan program pemerintahan mengalami perubahan karena adanya keadaan darurat Kesehatan covid-19. Namun kendala tersebut dapat dilewati dengan adanya penyederhanaan regulasi, birokrasi dan transformasi ekonomi.<sup>24</sup> Pada masa pandemi ini bidang ekonomi seperti usaha mikro kecil dan menengah dijadikan prioritas dan dialihkan untuk menggunakan sistem digital.<sup>25</sup> Hal tersebut merupakan sebuah momentum untuk dilakukannya perubahan ekonomi agar menjadi lebih baik dan tidak mengalami keterpurukan karena adanya pandemi.<sup>26</sup> Salah kebijakan yang dikeluarkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa penyederhanaan perizinan usaha, Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Stimulus Pariwisata.<sup>27</sup>

Pada 2021, Pemerintah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan perizinan berusaha berupa penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.<sup>28</sup> Melalui kebijakan ini, Pemerintah berharap pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih efektif, efisien, dan sederhana. Kemudian adanya pengesahan undang-undang cipta kerja yang menimbulkan banyak polemik. Melihat pada sisi lain kebijakan yang telah dibuat presiden Joko Widodo periode kedua memiliki kekurangan diantaranya adalah banyak pekerja yang ter-PHK sehingga terjadi peningkatan jumlah

---

<sup>22</sup> Irmaline Pakazeni Dan Cindy Nabila. 2020. "Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era Sby Dan Jokowi". *The Journalist Social And Government*. Vol. 1, No. 3, Hlm. 108.

<sup>23</sup> Sekretariat Presiden Ri. Diakses Pada 22 November 2023. *Presiden Joko Widodo • Presiden Ri*

<sup>24</sup> Cornelia Evelin Cabui. 2022. "Refleksi Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun Pada Periode Kedua Pemerintahan". *Jurnal Adhikari*. Vol. 1, No. 4, Hlm. 223.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Friski Riana. 2021. Tempo.co. diakses pada 3 Desember 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1437725/setahun-pandemi-covid-19-ini-aneka-kebijakan-pemerintah-dan-kritiknya>

<sup>28</sup> BPMI Setpres. 2021. Presiden Jokowi Resmikan Peluncuran Oss Berbasis Risiko. Doakses Pada 3 Desember 2023. *Oss - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*.

pengangguran, kemudian mengalami pelemahan pada ekonomi akibat perang dingin amerika dan tiongkok.

### **Tolak Ukur Pemenuhan Rasa Keadilan Pada Kebijakan Yang Telah Dibuat Dalam Dua Periode Dengan Pemimpin Yang Sama**

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya dapat dianalisis bahwa kebijakan yang telah dibuat baik di periode pertama dan kedua memiliki perbedaan tujuan, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya kondisi suatu negara, periode ke-2 masa kepemimpinan Joko Widodo tampaknya sangat berbeda dengan periode pertama, hal tersebut disebabkan oleh kondisi darurat yaitu pandemi. Pada periode pertama prinsip keadilan masih belum terpenuhi, terutama pada bidang hukum. karena pada periode pertama hanya terfokuskan pada infrastruktur dan pemerataan pada masyarakat saja, sehingga mengesampingkan hukum dan HAM.<sup>29</sup> Pada periode pertama banyak sekali peristiwa yang tampak lemah di bidang hukum, contohnya seperti pelemahan UU KPK dan adanya pengesahan UU KUHP.<sup>30</sup> Setelah kembali terpilih menjadi presiden untuk periode kedua kebijakan yang dikeluarkan pun berbeda dengan seiring perubahan situasi, pada periode ini seluruh negara mengalami krisis ekonomi karena adanya penyebaran virus *covid -19*. maka pada periode ini pemerintah lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan utama yaitu di bidang kesehatan dan ekonomi agar tetap stabil. namun tidak mengesampingkan kebijakan untuk melanjutkan rencana pemindahan ibu kota Indonesia.

Menurut Hans Kelsen keadilan suatu kebijakan dapat dikatakan adil apabila telah memenuhi tiga hal, yaitu adil menjamin kepentingan dasar dan kebahagiaan, menciptakan perdamaian masyarakat secara lahir maupun batin, dan memperoleh legalisasi oleh negara.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Roscoe Pound keadilan merupakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.<sup>32</sup> Rawls juga menanggapi tentang keadilan. Keadilan pada dasarnya tidak hanya muncul pada kesamaan hak saja, namun juga memberikan manfaat, kebebasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>33</sup> Sedangkan menurut teori kemanfaatan keadilan itu haruslah terukur, adapun alat ukur untuk menyatakan seberapa adilnya kebijakan yang telah

---

<sup>29</sup> Irmaline Pakazeni Dan Cindy Nabila. 2020. "Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era Sby Dan Jokowi". *The Journalish Social And Government*. Vol. 1, No. 3, Hlm. 108.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State Dalam Ahmad Tirmidzi, Dkk. 2022. "Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen Dan Waris Sunni (Studi Pmk Nomor 46/Puu-Viii/2010)". Jurnal Al Ijyimaiyyah. Vol. 8, No. 2, Hlm.297*

<sup>32</sup> Arifin, Zainal Mochtar dnn Eddy O S Hariej. *Op., cit.*

<sup>33</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak Dan Markus Y Hage. 2013. *Teori Hukum Startegi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta. Hlm 87-88.

diimplementasikan pada masyarakat.<sup>34</sup> Alat ukur yang digunakan disini adalah kemanfaatan bagi masyarakat umum, tujuan dan kebebasan dan persamaan hak.<sup>35</sup> Berikut adalah tabel perbandingan pemenuhan keadilan pada kebijakan yang dikeluarkan di periode pertama dan kedua.

**Tabel 1. Perbandingan Dalam Pemenuhan Keadilan**

<b>Alat ukur</b>	<b>Periode I</b>	<b>Periode II</b>
<b>Tujuan kebijakan</b>	<b>Tercapai</b> , hal ini dapat dilihat pada penurunan jumlah penduduk miskin <sup>36</sup>	<b>Tercapai</b> , Mengembangkan sumber daya manusia, dan menyelamatkan Masyarakat Indonesia dari krisis ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi
<b>Kegunaan bagi masyarakat umum</b>	<b>Tercapai</b> . Memberikan kemudahan dalam hal distribusi logistic di beberapa daerah Indonesia, memberikan kebebasan dalam berekspresi di sosial media. <sup>37</sup> Merupakan Implementasinya revisi UU ITE	<b>Tercapai</b> , dapat dilihat pada kebijakan yang dikeluarkan mengenai penyederhanaan perizinan usaha, Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Stimulus Pariwisata. <sup>38</sup>
<b>Kebebasan , keamanandan persamaan hak</b>	<b>Tercapai</b> , kebebasan berekspresi dalam pers, walaupun UU ITE sering disebut sebagai pasal karet. <sup>39</sup>	<b>Belum Tercapai</b> , karena masih banyak yang mengalami ancaman serangan digital, hilangnya kebebasan akademis dalam kampus dan UU ITE masih menjadi momok. <sup>40</sup>

Kebijakan yang telah dibuat di dua periode tersebut mayoritas telah mencapai keadilan dan memberikan manfaat bagi banyak orang, walaupun terkadang terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

<sup>34</sup> Arifin, Zainal Mochtar dan Eddy O S Hariej. Op., cit.

<sup>35</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak Dan Markus Y Hage. *Op.,cit*, Hlm 87-88.

<sup>36</sup> Hana Adi Perdana. 2019. "Ini Capaian Pembangunan Ekonomi Jokowi di Periode Pertama". *Idntimes.com*. [idntimes.com](https://idntimes.com)

<sup>37</sup> Pakazeni, Rmaline F dan Cindy Nabilla. (2020). "Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era Sby Dan Jokowi". *The Journalish*. Vol. 1, No. 3, Hlm. 106.

<sup>38</sup>Friski Riana. 2021. Tempo.co. diakses pada 3 Desember 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1437725/setahun-pandemi-covid-19-ini-aneka-kebijakan-pemerintah-dan-kritiknya>

<sup>39</sup> Pakazeni, Rmaline F Dan Cindy Nabilla. *Op., cit*.

<sup>40</sup> Komisi untuk orang hilang dan korban tindak pidana kekerasan. 2021. "Demokrasi perlahan mati di tangan Jokowi". Diakses pada 3 Desember 2023, [Final Catatan-2-Tahun-Pemerintahan-Jokowi---Maaruf-Amin-2.pdf \(kontras.org\)](https://kontras.org)

## **KESIMPULAN**

Pada dasarnya membuat kebijakan merupakan salah satu kewenangan dari Lembaga eksekutif, terkhusus presiden yang merupakan kepala pemerintahan. Dalam membuat suatu kebijakan tentu dilatar belakangi oleh kepentingan tertentu agar kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik. Kebijakan juga dapat memberikan gambaran mengenai model kepemimpinan seorang pemimpin. Salah satunya pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang memiliki perbedaan tujuan dalam hal membuat kebijakan disetiap periodenya. Hal tersebut dapat dipengaruhi dari beberapa factor, salah satunya situasi dan kondisi suatu negara. Berbicara tentang kebijakan tentu harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan. Adil yang dimaksud tidak hanya melihat pada kesamaan pemberian hak, tapi juga harus memiliki manfaat bagi masyarakat luas. Pada masa kepemimpinan Joko Widodo, dari periode 1 sampai 2 pencapaian keadilan dan kemanfaatan yang diperoleh dari kebijakan yang telah di buat telah terpenuhi, walaupun masih menemukan banyak kendala.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak Dan Markus Y Hage. 2013. *Teori Hukum Startegi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta. Hlm 86.
- Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak Dan Markus Y Hage. 2013. *Teori keluar sriwedari*
- Estomihi Fp Simatupang. 2020. “ *Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman*”. Media Belajar Hukum. Diakses, Diakses Pada 22 November 2023. *Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman - Beranda Hukum*
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, Dkk. 2022. *Hukum Kebijakan Publik*. Denpasar : Swasta Nulus. Hlm. 13.
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State Dalam Ahmad Tirmidzi*, Dkk. 2022. “*Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen Dan Waris Sunni (Studi Pmk Nomor 46/Puu-Viii/2010)*”. *Jurnal Al Ijyimaiyyah*. Vol. 8, No. 2, Hlm.297
- Startegi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta. Hlm 87-88.

### **Jurnal**

- Agssel Awanisa. 2022. ”*Analisis Hubungan Sistem Politik Dan Karakter Produk Hukum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*”. *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 4, No. 1, Hlm 44.
- Cornelia Evelin Cabui. 2022. “*Refleksi Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun Pada Periode Kedua Pemerintahan*”. *Jurnal Adhikari*. Vol. 1, No. 4, Hlm. 223.
- Farida Azzahra. 2021. “*Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia*”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 18, No. 2. Hlm. 155.



- Henny Juliani. 2020. “Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2020”. *Administrative Law Dan Governance Journal*. Vol. 3, No. 2. Hlm. 332.
- Hukumonline. Willa Wahyuni. 2022. Ada Keputusan Presiden Dan Instruksi Presiden, Apa Bedanya?. Diakses Pada 23 November 2023. Ada Keputusan Presiden Dan Instruksi Presiden, Apa Bedanya? (Hukumonline.Com)
- Irmaline Pakazeni Dan Cindy Nabila. 2020. “Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era Sby Dan Jokowi”. *The Journalist Social And Government*. Vol. 1, No. 3, Hlm. 108.
- Mochdar Suleman Dan Mohammad Noer. 2017..”Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015” *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*. Vol13, No. 1, Hlm. 1964.
- Pakazeni, Rmaline F dan Cindy Nabilla. (2020). “Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era Sby Dan Jokowi”. *The Journalish*. Vol. 1, No. 3, Hlm. 106.
- Rachmat Harun. 2015.“Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Lex Crimen*. Vol. Iv, No. 4, Hlm. 49.
- Ribkha Annisa Octovina. 2018. “Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.4, No.2,Hlm. 248.
- Rizal Irvan Amin, Riska Ulfasari Dan Tegar Satrio W. 2020. “Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 15, No. 2, Hlm. 191.
- Sekretariat Presiden Ri. Diakses Pada 22 Novvember 2023. Presiden Joko Widodo • Presiden RI

### **Undang-undang :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

### **Website**

- BPMI Setpres. 2021. Presiden Jokowi Resmikan Peluncuran Oss Berbasis Risiko. Doakses Pada 3 Desember 2023. Oss - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. <https://Peraturan.Go.Id> .Diakses Pada 11 November 2023.
- Detik News. Angga Laraspati. 2022. “Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Dinilai Buat Ekonomi Ri Kuat”. Diakses 22 November 2023. Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Dinilai Buat Ekonomi Ri Kuat (Detik.Com)
- Friski Riana. 2021. Tempo.co. diakses pada 3 Desember 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1437725/setahun-pandemi-covid-19-ini-aneka-kebijakan-pemerintah-dan-kritiknya>
- Friski Riana. 2021. Tempo.co. diakses pada 3 Desember 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1437725/setahun-pandemi-covid-19-ini-aneka-kebijakan-pemerintah-dan-kritiknya>

- Hana Adi Perdana. 2019. “Ini Capaian Pembangunan Ekonomi Jokowi di Periode Pertama”. Idntimes.com. Capaian Pembangunan Ekonomi Jokowi di Periode Pertama (idntimes.com)
- Irmaline Pakazeni Dan Cindy Nabila. 2020. “Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era Sby Dan Jokowi”. The Journalish Social And Government. Vol. 1, No. 3, Hlm. 108.
- Kompas. Fabian Januarius Kuwodo. 2018 . “4 Tahun Jokowi-Jk Dan Catatan Pembangunan Infrastruktur”. Diakses Pada 22 November 2023 .4 Tahun Jokowi-Jk Dan Catatan Pembangunan Infrastruktur (Kompas.Com)
- Sekretariat Presiden Ri. Diakses Pada 22 November 2023. Presiden Joko Widodo • Presiden Ri
- Sri Suwitri. .Buku Ajar Menegnai Analisis Kebijakan Publik. Diakses Pada 21 November 2023. Pdfkebijakan\_Publik-Libre.Pdf (D1wqtxts1xzle7.Cloudfront.Net)